SISTEM PELAYANAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KPPD DIY KABUPATEN BANTUL

LAPORAN MAGANG

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana

Disusun Oleh:

Danang Indra Gunawan

1121 31708

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2025

TUGAS AKHIR

LAPORAN MAGANG
SISTEM PELAYANAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KPPD KABUPATEN BANTUL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DANANG INDRA GUNAWAN

Nomor Induk Mahasiswa: 112131708

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing	Penguji
Wing Wahyu Winarno, Dr., MAFIS., Ak., CA.	Theresia Trisanti, Dr., MBA., Ak., CA.

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua

Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Laporan magang ini berisi rangkuman aktivitas magang yang berlangsung selama 66 hari di KPPD DIY Kabupaten Bantul, dimulai dari 02 September hingga 19 November 2024. Fokus magang adalah untuk memahami proses pelayanan pajak kendaraan bermotor. Selama periode tersebut, penulis turut serta dalam membantu petugas melayani wajib pajak, memeriksa kelengkapan dokumen, serta melakukan penginputan data ke dalam sistem. Dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diterima. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan terkait dengan lamanya antrean di saat-saat ramai. Sebagai langkah perbaikan, penulis merekomendasikan penerapan sistem antrean online. Selama menjalani magang, penulis telah mendapatkan pemahaman yang dalam mengenai aturan perpajakan kendaraan bermotor serta signifikansi peran KPPD dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kata kunci: KPPD DIY, Pajak, Magang

ABSTRACT

This internship report contains a summary of internship activities that lasted for 66 days at KPPD DIY Bantul Regency, starting from 02 September to 19 November 2024. The focus of the internship is to understand the motor vehicle tax service process. During this period, the author took part in helping officers serve taxpayers, checking the completeness of documents, and inputting data into the system. From the observation results, it can be concluded that the majority of taxpayers are satisfied with the services they receive. However, there are still several challenges related to long queues at peak times. As an improvement step, the author recommends implementing an online queuing system. During the internship, the author has gained a deep understanding of motor vehicle taxation regulations as well as the significance of the role of KPPD in regional revenue management.

Keywords: KPPD DIY, Tax, Internship

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan di berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hukum, politik, hingga pendidikan. Agar Pembangunan dapat terlaksana dengan baik, sangat penting bagi negara untuk memberikan perhatian pada isu pembiayaan usaha, yakni dengan mengoptimalkan pendapatan. Di Indonesia, penerimaan terbesar berasal dari pajak yang sebaiknya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan Indonesia ke masa yang akan datang. Yang mana salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Sejarah KPPD DIY (SAMSAT) BANTUL

SAMSAT pertama kali didirikan dan berlokasi di Gondolayu, Yogyakarta. Dalam rangka memudahkan pelayanan kepada wajib pajak, kantor SAMSAT didirikan di setiap kabupaten dan kota, salah satunya di Kabupaten Bantul. Pada tanggal 18 Agustus 1986, SAMSAT Bantul didirikan dan berlokasi di Jl. Badegan No 25, Bantul, Yogyakarta. Namun, pada tahun 2018 SAMSAT Bantul menempati gedung baru yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 25, Bejen, Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas SAMSAT berubah nama menjadi Kantor Pajak Pelayanan Daerah (KPPD).

Visi dan Misi KPPD DIY Kabupaten Bantul

- **Visi:** "Pelayanan secara profesional" yang mana dalam melakukan pelayanan akan memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak.
- **Misi:**
  1) Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wajib pajak.
  2) Memberikan kualitas pelayanan dalam registrasi dan pengecekan kendaraan bermotor.
  3) Meningkatkan *Skill* dan kesiplinan kepada petugas.
  4) Meningkatkan penerimaan daerah dan negara.

Dasar Hukum SAMSAT

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Dalam peraturan Presiden ini yang

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dimaksud Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Regristrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan koordinasi dalam kantor bersama Samsat.

Struktur KPPD Kabupaten Bantul

- Kepala Kantor
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Administrasi)
- Kepala Sub Bagian Pendaftaran dan Penetapan
- Kepala Sub Bagian Pembukaan dan Penagihan

SISTEM PELAYANAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN YANG TERSEDIA DI KPPD KABUPATEN BANTUL

Pelayanan Pembayaran Samsat Induk Bantul Meliputi:

1. Pelayanan Pembayaran Pajak Tahunan

Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan setiap tahun sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada batas waktu tahunan pembayaran pajak kendaraan bermotor ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD. Karena pembayaran dilakukan setiap tahun, maka istilah yang digunakan adalah PAJAK TAHUNAN. Untuk melakukan pembayaran Pajak Tahunan syarat yang perlu dilampirkan yaitu: STNK Asli, KTP Asli, dan STNK. Selain itu komponen pembayarann yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak dalam pajak tahunan adalah Pokok Pajak dan Sumbangan Wajib Jasa Raharja.

Berikut adalah Prosedur Pembayaran Pajak Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul:

1) Mengisi formulir perpanjangan STNK yang terdapat di KPPD.
2) Berikan formulir tersebut kepada petugas yang telah diisi bersama dengan informasi yang diperlukan.
3) Ambil surat pajak yang didapat dari petugas dan lanjutkan ke loket pembayaran pajak kendaraan bermotor.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4) Setelah itu, STNK akan diberikan kepada Anda yang disahkan sebagai bukti bahwa transaksi pajak kendaraan bermotor sudah selesai.

2. Pelayanan Pajak 5 Tahunan

Pembayaran pajak 5 tahunan merupakan kewajiban yang terkait dengan pembayaran PKB, yang dilakukan beriringan dengan pembuatan STNK dan TNKB (Plat Nomor) baru. STNK dan TNKP memiliki masa berlaku selama 5 tahun, sehingga istilah ini disebut sebagai Pajak 5 Tahunan. Perlu diingat bahwa pembayaran pajak 5 tahunan wajib dilakukan dengan datang langsung ke KPPD atau samsat setempat dan tidak bisa menggunakan metode pembayaran online.

Syarat-syarat yang diperlukan:

1) Kartu identitas asli (KTP/SIM/KK/Paspor) dan dua fotokopi.
2) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang asli serta dua fotokopi.
3) BPKB asli dan fotokopi. Apabila BPKB sedang dijadikan agunan, maka BPKB asli dapat diganti dengan surat keterangan BPKB sebagai agunan dan fotokopi BPKB.
4) Kendaraan terkait harus dihadirkan di samsat untuk pemeriksaan fisik.

Prosedur Pembayaran

1) Mendaftar cek fisik di loket fisik berada di *Basement* Samsat sebelah Barat dan lakukan pengecekan fisik akan dilakukan oleh Petugas Samsat
2) Pengesahaan hasil cek fisik di loket cek fisik;
3) Mendaftar di loket formulis di sebelah loket cek fisik untuk mendapatkan formulir permohonan STNK baru;
4) Masuki loket pendaftaran yang berada di lantai 1 untuk pengecekan berkas setelah itu mengambil nomor antrean layanan dan untuk membayar pajak dan PNBP;
5) Setelah pembayaran mengunggu panggilan dari loket Pengambilan STNK untuk mengambil STNK baru;
6) Menuju loket TNKB di *Basement* untuk mengambil Plat Nomor baru.

3. Balik Nama

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Prosedur perubahan data kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik lama ke pemilik baru. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu: KTP pemilik kendaraan yang baru, Bukti pembelian, STNK, BPKB, dan Administrasi (Besarnya Biaya Bea Balik Nama Kendaraan)

Prosedur Balik Nama Kendaraan Bermotor:

1) Mengumpulkan Fotokopi KTP, STNK dan BPKB
2) Melakukan Tes fisik kendaraan
3) Mengisi Formulir kendaraan balik nama dan melakukan pembayaran diantaranya:

4. Mutasi Masuk

Mutasi masuk adalah proses pemindahan pendaftaran kendaraan dari satu wilayah ke wilayah lain. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor diantaranya:

a. KTP sesuai alamat terbaru, BPKB asli, STNK asli.
b. Kuitansi jual beli bermaterai 10.000 (Jika Mutasi Masuk berganti pemilik).
c. Dokumen pengantar mutasi, surat keterangan fiskal dari samsat asal.
d. Dua rangkap fotokopi setiap dokuman di atas.

Jika Anda pindah ke wilayah baru dan ingin mendaftarkan kendaraan Anda di sana, berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan:

1) Cek Fisik Kendaraan: Langkah pertama adalah membawa kendaraan Anda ke Samsat Bantul untuk melakukan pemeriksaan fisik.
2) Cabut Berkas dari Samsat Asal: Pastikan semua berkas kendaraan sudah dicabut dari Samsat tempat kendaraan Anda terdaftar sebelumnya.
3) Daftar di Layanan BPKB: Setelah cek fisik dan berkas dicabut, daftarkan kendaraan Anda di Layanan BPKB Samsat Bantul.
4) Bayar PNBP BPKB: Setelah beberapa hari kerja, Anda perlu membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk BPKB.
5) Ambil Formulir STNK: Setelah pembayaran PNBP, ambil formulir permohonan STNK baru.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6) Daftar Mutasi Masuk untuk STNK dan Plat Nomor: Isi formulir STNK dan daftarkan mutasi masuk untuk mendapatkan STNK dan plat nomor baru.
7) Bayar Bea Balik Nama dan Pajak Kendaraan: Setelah beberapa hari, bayar bea balik nama, pajak kendaraan, dan PNBP STNK dan TNKB.
8) Ambil STNK dan Plat Nomor Baru: Setelah pembayaran, Anda dapat mengambil STNK dan plat nomor baru.
9) Ambil BPKB: BPKB baru akan diberikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

5. Mutasi Keluar

Mutasi Keluar Kendaraan adalah proses pemindahan pendaftaran kendaraan dari satu Samsat ke Samsat lain karena perubahan alamat pemilik kendaraan. Proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu:

1) Pemeriksaan Fisik: Kendaraan diperiksa secara fisik di Samsat tujuan pengobatan untuk memastikan kondisi kendaraan baik dan siap untuk didaftarkan di Samsat baru.
2) Pengajuan Permohonan: Setelah pemeriksaan fisik selesai, pemilik kendaraan mengajukan permohonan pencabutan berkas ke Samsat asal dengan melampirkan dokumen yang diperlukan. Kendaraan tidak perlu dibawa lagi ke Samsat asal karena pemeriksaan fisik sudah dilakukan di tujuan Samsat.
3) Proses Pencabutan Berkas: Proses pencabutan berkas ini memakan waktu sekitar 21 hari kerja.Temuan dari Pemeriksaan Fisik Kendaraan Samsat Tujuan Mutasi, yang disahkan di Loket Pemeriksaan Fisik Layanan BPKB Bantul.
4) Syarat yang perlu dibawa yaitu: BPKB Asli, STNK Asli, E-KTP pemilik terbaru sesuai tujuan mutasi, tanda terima pembelian dan penjualan, hibah, risalah lelang. Jika mutasi menghasilkan perubahan pada pemilik kendaraan, maka siapkan Materai 10.000. Empat rangkap fotokopi dari setiap dokumen.

6. Duplikat STNK

Duplikat STNK akan dikeluarkan jika terjadi dua faktor yaitu, STNK Hilang dan STNK Rusak.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A. STNK Hilang adalah kondisi dimana STNK tidak ada lagi atau sudah tidak ditemukan dimanapun. Hal ini dapat membuat kepemilikan kendaraan menjadi tidak sah dan bisa disalahgunakan oleh orang tidak bertanggungjawab, untuk menghindari itu wajib pajak perlu mengurusnya yang dapat dimulai dengan membuat laporan kehilangan di kantor kepolisian setempat. Setelah itu perihal kehilangan di iklankan di media cetak dan iklan radio dibuktikan dengan kuitansi pembayaran iklan dan potongan iklan yang telah terbit di media cetak. Setelah persyaratan terpenuhi silakan mengajukan permohonan duplikat STNK ke Samsat.

Dokumen yang diperlukan sebagai syarat mengurus STNK hilang sebagai berikut:

a. KTP asli dan fotokopi 1 lembar & BPKB asli dan fotolopi 1 lembar
b. Surat laporan kehilangan dari Polsek dan fotokopi 1 lembar
c. Bukti iklan radio dan koran
d. Surat pernyataan kehilangan STNK bermaterai
e. Membawa kendaraan untuk melakukan pengecekan fisik

B. STNK Rusak adalah rusaknya STNK yang menyebabkan surat tersebut tidak dapat dipakai lagi. STNK rusak dapat diganti dengan duplikat STNK yang dikeluarkan oleh Samsat. Untuk mengurus STNK rusak Wajib Pajak perlu memenuhi beberapa persyaratan diantaranya:

a. KTP asli dan fotokopi 1 lembar & BPKB asli dan fotokopi 1 lembar
b. Surat laporan kerusakan dari Polsek dan fotokopi 1 lembar
c. Pas foto berwarna dengan ukuran tertentu
d. Surat pernyataan pemilik STNK bermaterai
e. Membawa kendaraan untuk melakukan pengecekan fisik
f. Formulir permohonan di SAMSAT

Prosedur Pengurusan Duplikat STNK:

1) Pemohon duplikat STNK lakukan cek fisik di layanan cek fisik BPKB di Samsat Bantul. (Proses cek fisik tidak dipungut biaya).
2) Setelah mendapatkan hasil cek fisik, pemohon menuju ke loket Cek Fisik dan Formulir STNK di *Basement* Samsat Bantul untuk pengesahan hasil cek fisik dan mengambil formulir permohonan STNK Duplikat.
3) Pemohon mendaftarkan permohonan duplikat STNK.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4) Pada hari yang telah ditentukan, pemohon datang Samsat Bantul untuk pembayaran dan pengambilan STNK.
5) Jika proses permohonan sudah masuk bulan jatuh tempo pajak atau ada tunggakan pajak yang belum dibayar maka pemohon diwajibkan untuk melunasi tagihan pajak tersebut.

7. Rubah Bentuk Ganti Warna (RUBENTINA)

RUBENTINA merupakan layanan untuk kendaraan bermotor baik yang ingin mengubah bentuk ataupun mengganti warna. Layanan ini wajib dilakukan jika ingin memodifikasi pada kendaraan yang merubah bentuk, konstruksi, meterial, maupun warna kendaraan. Hal ini wajib dilakukan untuk memastikan bahwa modifikasi yang dilakukan telah memenuhi standar kelayakan pakai.

Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan RUBENTINA diantaranya:

a. E-KTP asli, BPKB asli, STNK asli
b. Surat keterangan Rubah bentuk atau Ganti warna dari Karoseri (Bengkel)
c. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
d. Surat registrasi uji tipe untuk kendaraan Rubah bentuk

Prosedur untuk melakukan RUBENTINA:

1) Pemohon yang telah melengkasi persyaratan dan mendatangi Unit BPKB Polres Bantul.
2) Lakukan cek fisik kendaraan di Samsat Bantul yang selanjutnya wajib pajak menunggu pengesahaan hasil cek fisik kendaraan di Samsat.
3) Lakukan pembayaran formulir PNPB.
4) Masuki Lantai satu Kantor Samsat Bantul, tepatnya di loket 1 untuk menyerahkan dokumen dan registrasi.
5) Selanjutnya di loket 4 penyerahan tanda terima dilanjutkan penetapan, pembayaran pajak, dan menerima STNK baru.

8. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BPKB adalah surat berharga yang dibutuhkan pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak, dokumen ini tanda bukti resmi atas kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berisi informasi mengenai identitas resmi pemilik kendaraan, sedangkan STNK berisi informasi mengenai kendaraan bermotor secara spesifik.

Jika BPKB hilang atau rusak maka perlu segera mengurus penggantinya untuk menghindari masalah hukum dan menghindari penyalahgunaan dari orang tidak bertanggungjawab. Untuk mengurus BPKB yang hilang pemohon wajib lapor ke SPKT terlebih dahulu, nantinya petugas akan memberikan SKTLK sebagai syarat mengurus BPKB yang hilang.Surat keterangan kehilangan BPKB dari Kepolisian Sektor

1) KTP asli & STNK asli dan fotokopiannya.
2) Surat pernyataan kehilangan BPKB dan materai.
3) Membawa bukti penyiaran yang sudah diiklankan di media massa, lalu dicetak sebanyak 3 kali berturut-turut dengan waktu yang masing-masing 1 minggu di media cetak yang berbeda.
4) Surat keterangan dari Reskim & Surat keterangan tidak dalam status peminjaman (penggadaian).
5) Lakukan cek fisik kendaraan di Kepolisian Daerah.
6) Jika BPKB tersebut milik perusahaan maka, wajib membawa lampiran fotokopi surat kuasa dan SIUP.
7) Jika kendaraan masih masih dalam *leasing,* maka BPKB akan dipegang *leasing* terlebih dahulu.

Pelayanan *Drive Thru*

Samsat *Drive Thru* merupakan *counter* layanan yang cepat, tepat, dan efisien untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK. Pada sistem layanan pembayaran ini tidak melayani perpanjangan STNK 5 Tahunan dan pelayanan blokir karena layanan *Drive Thru* hanya melayani pengesahan STNK atau Pajak Tahunan saja. Adapun persyaratan yang harus dibawa oleh wajib pajak yaitu: E-KTP asli pemilik kendaraan, STNK asli, SKPD asli, Kendaraan yang bersangkutan, dan tidak perlu lagi membawa fotokopiannya.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Prosedur Pembayaran:

1) Membawa kendaraan yang bersangkutan ke lokasi *Drive Thru* (Wajib Pajak tidak perlu turun dari kendaraannya, cukup mempersiapkan dokumen asli yang dibutuhkan yaitu: STNK, SKPD asli, dan KTP pemilik kendaraan).
2) Pada loket pertama Wajib Pajak langsung melakukan menyerahkan dokumen yang sudah disiapkan kepada petugas dan langsung lakukan pembayaran.
3) Selanjutnya Wajib Pajak perlu maju menuju loket 2 untuk mengambil STNK dan SKPD baru dan prosespun selesai.

Pelayanan Pembayaran Via Aplikasi (E-Posti)

E-Posti adalah Paos Titian elektronik diciptakan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajak kendaraan bermotor, KPPD Kabupaten Bantul menawarkan inovasi layanan yang mencetak bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor dan otentikasi STNK secara terpisah. Pembayaran yang dimaksud dilakukan melalui mobile banking BPD DIY dan ATM BPD DIY.

Sebelum menggunakan sistem E-Posti untuk membayar pajak kendaraan bermotor, penting untuk diingat bahwa:

a. Pemilik rekening buku tabungan harus sama dengan kendaraan yang bersangkutan.
b. Nomor Induk Keluarga telah terdaftar di KPPD DIY Kabupaten Bantul.
c. Hanya pajak tahunan yang dapat dibayar melalui E-Posti; Pajak lima tahun tidak dapat dibayar menggunakan metode ini.

Setelah berhasil melakukan pembayaran dan sudah mendapatkan kode refenensi dari mesin ATM atau dari M-Banking selanjutnya pemilik kendaraan dapat menuju ke tempat Mesin E-Posti untuk mencetak bukti bayar dan pengesahan STNK. Saat ini di Wilayah Bantul sudah terdapat 6 Mesin E-Posti yang berlokasi: ATM BPD Cabang Bantul, ATM BDP Samsat Bantul, ATM BDP Samsat Sewon, ATM BDP Komplek Parasamya, ATM BDP Capem. Sedayu, dan ATM BDP Capem. Wiyoro

Bukti bayar dari E Posti dicetak dengan mesin sudah berlaku seperti bukti bayar dari loket layanan pembayaran pajak secara reguler. Jika menghendaki bukti bayar yang seperti

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

umumnya, pengguna E-Posti dapat menukarkan bukti bayar dari mesin E-Posti di loket layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor terdekat.

Samsat Digital Nasional (SIGNAL)

SIGNAL adalah aplikasi digital resmi Samsat yang dapat membantu siapa saja dengan tugas-tugas terkait Samsat, seperti membayar pajak. Ketersediaan aplikasi ini tentunya akan membuat pembayaran pajak lebih aman dan cepat tanpa mengharuskan kita untuk mengantre.

Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan metode SIGNAL:

a. Kartu identitas asli berupa foto atau scan KTP dan STNK
b. Hasil scan atau foto BPKB asli
c. Pajak kendaraan tidak sedang menunggak lebih dari 1 tahun
d. Memiliki smartphone yang terhubung ke internet
e. Memiliki nomor ponsel yang aktif
f. Kendaraan tidak dalam status pemblokiran data kepemilikan
g. Pajak sepeda motor memiliki masa berlaku kurang dari enam bulan sejak tanggal jatuh tempo.

Pelayanan JEMPOL SI PANDA

JEMPOL SI PANDA singkatan dari Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan Bermotor. Layanan ini beroperasi selama enam hari dalam satu minggu, dengan menggunakan armada mobil. Tujuan layanan JEMPOL SI PANDA adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pengesahan STNK:

a. Memudahkan masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul (Samsat Induk).
b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
c. Mendorong masyarakat wajib pajak untuk membayar PKB secara tepat waktu.

Beberapa layanan yang diberikan oleh JEMPOL SI PANDA, antara lain: Pembayaran PKB, Pembayaran SWDKLLJ, Pengesahan STNK satu tahunan, Pengesahan pasca pembayaran online. Sistem pelayanan ini jam operasional yang tersedia untuk hari Senin hingga Kamis mulai jam 08.00 sampai jam 12.00 WIB dan pada hari Jum'at-Sabtu mulai jam 08.00 sampai jam 11.00 WIB.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bantul membuka layanan pembayaran pajak keliling di beberapa lokasi dari hari Senin hingga Hari Sabtu. JEMPOL SI PANDA memiliki jadwal sebagai berikut:

Hari	Lokasi	Waktu
Senin	Kapanewon Kretek	08.00 – 12.00
Selasa	Kapanewon Pleret	08.00 – 12.00
Rabu	Kapanewon Dlingo	08.00 – 12.00
Kamis	Kalurahan Bangunjiwo	08.00 – 12.00
Jumat	Kalurahan Guwosari	08.00 – 11.00
Sabtu	Kalurahan Ngestiharjo	08.00 – 11.00

Dengan Persyaratan:

a. STNK asli, E-KTP atau Kartu Keluarga & Surat Izin Mengemudi
b. Masing-masih fotokopi 1 lembar

Prosedur JEMPOL SI PANDA:

1) Kunjungi pelayanan JEMPOL SI PANDA terdekat, Wajib pajak dapat mengetahui alamat tepatnya di akun media sosial resmi KPPD Kabupaten Bantul atau Samsat Bantul. Lengkapi formulir yang diberikan petugas.
2) Berikan formulir yang telah diisi dan dokumen yang diperlukan kepada petugas.
3) Anda dapat memberikan fotokopi BPKB dan surat pengantar dari perusahaan pembiayaan jika sepeda motor wajib pajak masih dalam status kredit atau cicilan.
4) Bayar pajak kendaraan sesuai dengan yang tercantum untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
5) Setelah itu, simpan bukti pembayaran dan STNK dapat mengambil diproses selanjutnya.Tunjukkan bukti pembayaran sebelumnya dan ambil STNK yang dikeluarkan secara sah sebagai bukti bahwa telah membayar pajak motor.

AKTIVITAS MAGANG

Dimulai pada tanggal 2 September 2024 dan berakhir pada 19 November 2024, penulis magang di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Bantul. Penulis diwajibkan mematuhi jam operasional KPPD DIY Kabupaten Bantul, yaitu mulai jam 07.30

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

hingga jam 14.30 WIB. Namun untuk jam layanan pajak KPPD DIY Kabupaten Bantul adalah dari jam 08.00 hingga jam 13.00 WIB, yang beroperasi setiap hari Senin hingga Sabtu.

Dalam kegiatan magang, penulis diberikan beberapa jenis kegiatan yang memberikan banyak pengalaman baru bagi penulis. Berikut jenis kegiatan yang penulis lakukan selama magang tersebut sebagai berikut:

1. **Memberikan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK Kepada Wajib Pajak.**

   Penulis diposisikan di bagian *Drive Thru*, di mana penulis memiliki tugas memberikan surat pembayaran PKB dan STNK kepada wajib pajak. Pegawai KPPD Kabupaten Bantul akan mencetak bukti pembayaran dahulu dan akan diserahkan kepada penulis. Selanjutnya penulis akan diberikan tugas untuk mengecek apakah bukti pembayaran tersebut sesuai dengan STNK kendaraan jika sudah benar maka penulis akan memberi cap lalu menyerahkan kembali PKB, STNK dan KTP beserta uang kembaliannya kepada Wajib Pajak.

2. **Penulisan, Pengecapan, serta Meregistrasi Dokumen Kendaraan Wajib Pajak**

   Tahap ini penulis diberikan tugas untuk mengambil dokumen yang dibawa oleh pegawai dilantai satu untuk memasukan ke dalam map baru dan menulis di map tersebut sesuai dengan dokumen pajak kendaraan tersebut. Selain itu penulis melakukan pengecapan pada map sesuai dengan kebutuhan dari Wajib Pajak seperti, Mutasi Masuk, Pindah Alamat, Balik Nama, Ganti Nomor Polisi, Ganti Warna Kendaraan, Plat Nomor Kuning, Rubah Bentuk, dan Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang hilang maupun rusak. Selanjutnya menuliskan pada buku Registrasi tanggal penulisan tersebut.

3. **Menyeri Berkas 5 Tahunan**

   Tahap ini penulis diberikan tugas, yaitu Wajib Pajak 5 tahunan. Berkas ini berisi identitas wajib pajak, cek fisik kendaraan, Formulir Kendaraan, dan STNK. Selanjutnya penulis akan mengelompokkan berdasarkan angka Nomor Polisi. Angka 1, 7, 8,dan 9 itu berarti kendaraan roda 4, angkutan umum atau kendaraan angkutan barang dan angka 2, 3, 4, 5 dan 6 itu kendaraan roda 2. Jika sudah sesuai maka dokumen tersebut dikelompokkan kembali berdasarkan huruf terakhir Nomor Polisi (contoh JK, TC, LK dan lain-lain).

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Mencocokan dan Pengecekan Data Wajib Pajak Tunggakan

Penulis akan melaksanakan tugas sesi penagihan pada bagian ini. Penulis akan mencocokkan data satu per satu dengan memasukkan nomor polisi ke dalam sistem untuk melihat apakah cocok dengan nama pemilik kendaraan. Jika sudah, penulis akan mencatat wajib pajak yang telah membayar pajak kendaraan pada tahun 2024 dan mencatat tanggal pembayaran pada laporan. Karyawan akan memberikan data pada laporan yang belum didaftarkan ulang untuk roda dua dan roda empat.

5. Membuat Rekapan Data Pajak untuk Tahun 2024

Pada bagian ini penulis diminta untuk membuatkan rekapan pada excel dari data yang sudah dicocokan pada kegiatan pengecekan pajak tunggakan. Penulis akan mencatat dan menjumlah semua total pajak tunggakan yang sudah terbayar dari bulan Januari hingga bulan November (Desember tidak termasuk karena penulis magang hanya sampai bulan November saja). Rekapan ini hasilnya akan dilaporkan kepada Kepala KPPD Kabupaten Bantul apakah sesuai target atau belum pada tahun 2024.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh warga negara atau badan usaha kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut para ahli:

Prof. Dr. Rochmat Soemitro: Pajak adalah kontribusi warga negara ke kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Prof. Dr. PJA Andriani: Pajak adalah iuran wajib yang tidak ada ketidakseimbangan secara langsung, digunakan untuk membiayai biaya umum pemerintahan.

Mardiasmo: Pajak adalah kontribusi wajib yang tidak ada kompensasi layanan khusus, digunakan untuk memuat berbagai inisiatif pemerintah.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jenis Pajak

Resmi (2014:7) menegaskan, "pengelompokan berdasarkan kelompok, pengelompokan berdasarkan sifat, dan pengelompokan berdasarkan lembaga pemungututan". Kategori ini akan dibahas di bawah ini:

A. Mereka dibagi menjadi dua kategori berdasarkan Kelompok Pajak, yaitu:

Pajak langsung adalah pajak yang wajib dibayar wajib pajak secara pribadi dan tidak dapat dialihkan atau ditagihkan kepada pihak ketiga, seperti pajak penghasilan (PPh), harus menjadi tanggung jawab bagi wajib pajak orang pribadi.

Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pemungutannya dibebankan kepada pihak lain. Konsekuensinya, orang yang bertanggung jawab atas administrasi dan pembayar pajak adalah orang yang berbeda yang pada akhirnya dapat ditagihkan dan diberikan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung bisa terjadi karena suatu hal seperti kegiatan yang menyebabkan terutangnya pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

B. Berdasarkan Sifatnya, Pajak terbagi menjadi dua kelompok, diantaranya :

Pajak Subjektif merupakan pajak yang dikenakan dengan mempertimbangkan keadaan individu wajib pajak atau yang memperhatikan keadaan subjek, seperti pajak penghasilan (PPh).

Pajak Objekif seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan pajak lainnya adalah contoh pajak objektif. Pajak ini dikenakan dengan memperhatikan hal-hal seperti benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak, tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

C. Berdasarkan Lembaga Pemungut Pajak dikategorikan menjadi dua, diantarannya:

Pajak Negara (Pajak Pusat) merupakan pajak yang dipungut secara langsung oleh negara dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, contohnya Pajak Penghasilan, PPN serta PPnBM.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Pajak ini dimanfaatkan untuk memajukan daerah masing-masing, contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan pihak yang memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, seluruh pemilik atau pengguna kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar pajak atas kendaraan yang mereka miliki.

Jenis-Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu pajak tahunan dan pajak lima tahunan.

1. **Pajak tahunan**

   Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan adalah iuran wajib yang harus dibenarkan setiap tahun oleh pemilik kendaraan bermotor di Indonesia. Besaran pajak ini ditentukan berdasarkan nilai jual kendaraan yang terus menurun seiring bertambahnya usia.

2. **Pajak Lima Tahunan:**

   Selain pajak tahunan, ada juga pajak lima tahunan yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pajak ini mencakup pembayaran, penggantian plat nomor, dan perpanjangan STNK. Tujuannya adalah untuk memastikan kendaraan tetap laik jalan dan memenuhi standar keselamatan.

Pajak untuk Kendaraan Baru

Kewajiban pajak untuk mobil baru mencakup:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tarif PPN yang sesuai adalah 12% dari harga jual kendaraan, yang sama di seluruh negeri. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. PPnBM adalah pajak yang terutama ditargetkan untuk barang-barang mewah, seperti *Super Car* yang memiliki fitur tertentu. Pajak ini ditentukan oleh sejumlah variabel, antara lain tipe bodi kendaraan, sistem penggerak roda, jenis bahan bakar, dan kapasitas mesin, yang semuanya mewakili kompleksitas dan kemewahan kendaraan.
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) harus dibayar setelah mempunyai kendaraan baru. Pajak Kendaraan Bermotor ini mungkin bersifat progresif, artinya semakin banyak kendaraan yang dimiliki, maka besaran pajaknya juga akan naik.
4. BBNKB wajib dibayarkan pada saat registrasi kendaraan baru. BBNKB untuk kendaraan baru bisa mencapai 12,5% dari harga kendaraan untuk pengiriman awal di beberapa wilayah. Area pendaftaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pungutan ini. Berbeda dengan pajak lainnya, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) merupakan iuran asuransi wajib yang diawasi oleh PT. Pelayanan Raharja. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, besaran pembayarannya ditetapkan sesuai dengan jenis kendaraan dan ukuran cc.
5. STNK dan TNKB merupakan biaya yang dibayarkan setiap lima tahun sekali bersamaan dengan ganti plat nomor kendaraan. Dalam kegiatan pembuatan atau perpanjangan STNK dan TNKB, pihak kepolisianlah yang akan mengelola dari pendapatan tersebut.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif pajak kendaraan bermotor menetapkan tarif PKB ditetapkan sebesar:

a. 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan.
b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum.
c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, TNI POLRI dan pemerintah daerah.
d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat.
e. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi roda 4 serta kendaraan bermotor roda 2 yang kapasitas silinder 250 ke atas, dikenakan tarif secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi sebesar 3,5%.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KOMBINASI BISNIS

Komunikasi bisnis adalah kunci keberhasilan dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan. Proses pertukaran informasi yang efektif memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan kebijakan, membangun hubungan dengan masyarakat atau wajib pajak, dan memastikan program-program berjalan dengan baik. Dalam konteks internal, komunikasi yang baik juga penting untuk menjaga hubungan antar karyawan dan meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul. Komunikasi Bisnis dalam konteks pajak kendaraan bermotor berfungsi untuk:

a. Menerangkan kebijakan pajak: Masyarakat perlu memahami dasar hukum, tujuan, dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor.
b. Membangun hubungan dengan wajib pajak: Komunikasi yang terbuka dan responsif dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.
c. Meningkatkan transparansi: Melalui komunikasi yang jelas, pemerintah dapat menunjukkan bagaimana dana pajak kendaraan bermotor digunakan.
d. Mempromosikan program terkait: Misalnya, program penghapusan denda atau insentif pajak dapat dikomunikasikan secara efektif untuk menarik minat wajib pajak.
e. Mendorong partisipasi masyarakat: Masyarakat dapat diajak untuk memberikan masukan atau melaporkan jika ada ketidaksesuaian terkait pajak kendaraan bermotor.

Dengan komunikasi yang baik, diharapkan dapat tercipta kondisi perpajakan yang kondusif, meminimalisir terjadinya tunggakan pajak, dan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

ANALISIS PERMASALAHAN

Penulis menemukan sejumlah permasalahan selama melakukan kerja magang di Kantor Pajak Daerah Kabupaten Bantul, antara lain:

Kurangnya Informasi yang Jelas Mengenai Keperluan yang Wajib di bawa Oleh Wajib Pajak Pada Sistem Pelayanan *Drive Thru*

Banyak Wajib Pajak yang masih belum jelas mengenai prosedur pembayaran misalnya, dokumen dan kelengkapan apa saja yang diperlukan dalam pembayaran baik pajak untuk satu tahunan maupun pajak lima tahunan. Hal ini sering penulis temui saat penulis

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ditugaskan di bagian loket *Drive Thru*, masih banyak wajib pajak yang belum tau mengenai syarat apa saja yang harus dibawa oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran di *Drive Thru,* seperti kelengkapan dokumen berupa STNK, PKB, KTP bisa juga SIM pemilik dan harus membawa kendaraan yang bersangkutan (kendaraan yang akan dibayar pajaknya), karena kendaraan tersebut akan diperiksa oleh petugas terlebih dahulu sebelum STNK dan PKB baru akan dicetak.

Wajib Pajak Melakukan Protes Karena Banyaknya Denda Keterlambatan Pajak Tahunan

Kegiatan magang kali ini, penulis ditempatkan pada bagian penerimaan pembayaran pajak tahunan. Dari yang penulis amati, masalah ini karena Wajib Pajak yang kurang disiplin atau kurangnya pemahaman mengenai informasi tanggal batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor satu tahunan di Surat Tanda Nomor Kendaraan, seringkali membuat wajib pajak telat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berakibat wajib pajak tidak sadar bahwa mereka sudah terkena denda keterlambatan bayar pajak yang cukup besar.

Banyaknya Dokumen Pajak yang Masuk dan Menumpuk

Dokumen pajak merupakan surat yang diperlukan sebagai syarat untuk sebagai bukti dalam mencatat pada map baru yang nantinya akan diproses oleh pegawai untuk di input pada *Software* Pajak Kendaraan Daerah. Pada bagian ini penulis diberikan tugas untuk memasukan ke dalam map baru dan menulis di map tersebut sesuai dengan dokumen pajak kendaraan tersebut. Selain itu pada bagian ini penulis juga akan mambantu memberikan cap pada map sesuai dengan kebutuhan dari Wajib Pajak seperti, Mutasi Masuk, Pindah Alamat, Balik Nama, Ganti Nomor Polisi, Ganti Warna Kendaraan, Plat Nomor Kuning, Rubah Bentuk, dan Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang hilang maupun rusak. Selanjutnya menuliskan pada buku Registrasi tanggal penulisan tersebut dan disimpan di dalam rak. Kegiatan tersebut semua dikerjakan oleh penulis sendiri terkadang dibantu oleh petugas namun jarang, dari banyaknya dokumen yang masuk serta kurangnya anggota pegawai untuk mengurus pemberkasan dokumen mengakibatkan pekerjaan menjadi terasa berat.

Kurang Stabilnya Jaringan Internet dan Komputer yang Lemot

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jaringan internet yang tidak stabil menjadi kendala besar dalam mengerjakan tugas yang diberikan perlu menggunakan jaringan internet. Akibat dari jaringan yang tidak stabil penulis mengalami masalah dalam proses penginputan data seperti mengisi formulir digital, mengunggah dokumen, dan mengakses data menjadi terhambat. Tidak jarang penulis juga harus mengulang semua data yang sudah di input karena data tersebut hilang akibat masalah jaringan yang tidak stabil. Banyaknya wajib pajak yang masuk mengakibatkan dokumen menumpuk karena harus menunggu proses yang cukup lama, antreanpun menjadi panjang dan wajib pajak menjadi tidak puas atas pelayanan tersebut.

PEMBAHASAN ATAS PERMASALAHAN

Dari beberapa permasalahan di atas, pemecahan masalah yang penulis lakukan sebagai berikut:

Kurangnya Informasi yang Jelas Mengenai Keperluan yang Wajib di bawa Oleh Wajib Pajak pada Sistem Pelayanan *Drive Thru*

Penulis memberikan penjelasan kepada wajib pajak jika melakukan pembayaran pajak motor dari metode pembayaran *Drive Thru*, wajib pajak wajib memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Kendaraan yang dapat melakukan pembayaran pajak melalui Samsat *Drive Thru* adalah kendaraan yang tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun dan berdomisili di Kabupaten Bantul. Dokumen yang diperlukan yaitu:

a. E-KTP asli
b. BPKB asli
c. STNK asli tanpa perlu difotokopi lagi.

Wajib Pajak Melakukan Protes Karena Banyaknya Denda Keterlambatan Pajak Tahunan

Penulis memberikan penjelasan kepada wajib pajak untuk informasi batas jatuh tempo pembayaran pajak itu tertera pada Pelunasan Kewajiban Pembayaran (PKB). Keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor memang cukup besar dendanya maka sebab itu wajib bayar banyak yang kaget atas besaran denda yang mereka terima, pada permasalahan ini penulis memberikan penjelasan bahwa keterlambatan bayar pajak kendaraan bermotor itu sudah ada Undang-Undang yang mengatur atas keterlambatannya sebagai berikut:

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis juga memberikan perhitungan kepada wajib pajak atas keterlambatan bayar pajak kendaraan bermotor yang mereka kenai sebagai berikut:

a. Jika Wajib Pajak terlambat membayar pajak kendaraan bermotor 2 hari sampai 1 bulan maka denda dikenakan sebesar 25%.
b. Jika keterlambatan 2 bulan maka perhitungannya adalah : PKB x 25% x 2/12 + denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
c. Jika Keterlambatan 6 bulan maka perhitungannya adalah : PKB x 25% x 6/12 + denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
d. Jika Keterlambatan 1 tahun maka perhitungannya adalah : PKB x 25% x 12/12 + denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
e. Jika Keterlambatan 2 tahun maka perhitungannya adalah : 2 x PKB x 25% x 12/12 ditambah denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Besarnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bagi roda 2 dengan mesin 50 cc -250 cc sebesar Rp35.000, namun untuk sepeda motor dengan mesin di atas 250 cc biayanya Rp80.000, sementara untuk roda 4 yang bukan angkutan umum sebesar Rp153.000. Biaya tersebut sudah termasuk penggantian pembuatan kartu dana atau sertifikat (KD/SERT) sebesar Rp3.000. Hal ini sudah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan NO. 36 Tahun 2008.

Banyaknya Dokumen Pajak yang Masuk dan Menumpuk

Pada permasalahan ini penulis datang lebih cepat dari jadwal jam operasional, datang lebih pagi penulis bisa menyelesaikan beberapa tugas yang bisa diselesaikan terlebih dahulu seperti penulisan berkas baru pada map dan memberi cap. Selanjutnya penulis melanjutkan proses registrasi dan perapian dokumen yang akan disimpan pada rak bisa lebih santai. Dengan begitu penulis bisa melanjutkan aktivitas lainnya tidak terlalu terbebani karena sudah dicicil di awal.

Kurang Stabilnya Jaringan Internet dan Komputer yang Lemot

Untuk mengatasi permasalahan ini, penulis menyarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Daerah untuk memperbaiki jaringan dan memberikan pengecekan komputer secara rutin agar dalam melakukan kegiatan pelayanan kepada wajib pajak bisa berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan antrean yang panjang. Namun sembari menunggu perbaikan itu dilakukan oleh pihak kantor, penulis memiliki cara lain untuk mengurangi permasalahan

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tersebut dengan cara, dalam melakukan penginputan data wajib pajak, penulis akan menyimpan terlebih dahulu data yang sudah diinput satu-persatu meskipun hal ini akan memakan banyak waktu karena lebih berbelit-belit prosesnya tapi setidaknya penulis tidak perlu lagi menginput data wajib pajak dari awal lagi karena permasalahan jaringan yang kurang stabil yang menyebabkan data pajak hilang sendiri.

PENUTUP

Penulis telah menyelesaikan program magang selama 66 hari di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul. Selama magang, penulis terlibat langsung dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak terkait pajak kendaraan bermotor. Pengalaman ini memberikan penulis pengetahuan dan keterampilan baru, seperti:

- Pemahaman mendalam tentang prosedur dan persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- Keterampilan komunikasi yang baik dalam menjelaskan hal-hal teknis kepada wajib pajak secara sederhana.
- Pengalaman bekerja dalam tim dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.
- Pengetahuan tentang berbagai layanan pajak yang disediakan oleh kantor, termasuk pembayaran online dan layanan keliling.

Secara keseluruhan, magang ini telah meningkatkan kepercayaan diri penulis dalam menjalankan tugas dan memberikan kontribusi positif bagi kantor.

Rekomendasi Bagi Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul

a. Diharapkan ketika menjelaskan pekerjaan yang akan diberikan kepada para magang, pengawas kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul bisa lebih detail dan komunikatif.
b. Perlu memperbaiki sarana pelayanan seperti Jaringan Internet yang lebih stabil dan memberikan perbaikan untuk komputer secara berkala agar dalam melakukan pekerjaan maupun memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak bisa berjalan lebih baik lagi.
c. Perlu menambah *staff* terutama pada bagian pemberkasan untuk memaksimalkan waktu agar tidak menumpuk dan bisa lebih efisien dalam melakukan kegiatan tersebut.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rekomendasi Bagi STIE YKPN Yogyakarta

Diharapkan dari pihak STIE YKPN Yogyakarta dapat memberikan fasilitas yang memudahkan mahasiswanya untuk mencari tempa t magang yang sesuai dengan jurusan. Hal ini dimaksudkan agar STIE YKPN Yogyakarta dapat menawarkan berbagai sumber informasi yang akan membantu siswa menemukan magang yang sesuai dengan jurusan mereka dan memberi mereka ikhtisar kegiatan magang sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk melakukan kegiatan magang.

REFLEKSI DIRI

Selama menjalani magang di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten Bantul, penulis memperoleh banyak manfaat dan pengalaman berharga. Beberapa hal penting yang didapat antara lain:

- Peningkatan kemampuan komunikasi: Penulis menjadi lebih percaya diri dan terampil dalam berkomunikasi dengan orang lain, baik rekan kerja maupun wajib pajak.
- Pengembangan kemampuan bekerja sama: Penulis belajar untuk bekerja sama dengan baik dalam tim dan menghargai masukan dari orang lain.
- Pengetahuan baru tentang perpajakan: Penulis memahami lebih dalam mengenai pajak kendaraan bermotor, termasuk prosedur dan persyaratannya.
- Pemahaman sistematika kerja: Penulis mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistematika kerja yang diterapkan di KPPD.

Secara keseluruhan, pengalaman magang ini memberikan bekal yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Penulis berharap ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dengan baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Dr. Rochmat Soemitro, S. H. (2013). *Perpajakan* Edisi Revisi 2013.

Indonesia, R. (2009). Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Indonesia.(2015). *Peraturan Presiden* Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Indosensia. (2008). *Undang-Undang* Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Jakarta J. JDIH - Jakarta. JDIH - Jakarta. Published 2015. Accessed December 8, 2024. https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/10103.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.

Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Profil Samsat Bantul. Samsat-jogjaprov.id. Published 2019. Accessed December 8, 2024. https://samsat-jogjaprov.id/profilbantul.php.

Provinsi DKI Jakarta. 2015. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*. Jakarta.

Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan 33 /PMK.010/2017.*

Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Sekretariat Negara.* Jakarta

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Delapan. Salemba Empat, Jakarta Selatan.

repository.stieykpn.ac.id